

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Tumbuhnya bisnis kelapa sawit oleh rakyat di Asahan merebak sejak dibukanya peluang oleh perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahan yang meminta suplay bahan dari kebun rakyat. Pertumbuhan bisnis ini diikuti oleh perubahan penggunaan lahan pertanian pangan menjadi kebun sawit, dan peningkatan produksi kelapa sawit secara signifikan (400 persen) mengalahkan komoditi unggulan kebun yang lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
2. Dalam konteks bisnis kelapa Sawit saat ini, perhatian dunia tertuju pada komoditas kelapa Sawit yang saat ini sangat berkembang di Asia, tidak terkecuali di Indonesia yang notabene merupakan penghasil minyak sawit terbesar kedua sesudah Malaysia. Dengan produksi sebesar 16 juta ton per tahun pada 2006, Indonesia memastikan diri untuk menjadi yang terbaik di Industri Kelapa Sawit di masa depan sebagai industri *oleochemical* dan industri *biodiesel* berbahan baku sawit. Luasan kebun kelapa Sawit merupakan yang terluas dibandingkan dengan jenis komoditi lainnya. Ini menandakan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman yang menjadi tumpuan pemerintah melalui perkebunannya. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa

dengan penurunan luas areal sektor pertanian pangan, maka sudah dapat diprediksikan terjadi juga penurunan produksi terhadap sektor pertanian pangan seperti Padi dan Jagung, tentu saja faktor utamanya adalah ekspansi luasnya perkebunan Sawit khususnya di Kecamatan Meranti.

3. Pilihan-Pilihan dan Pengambilan Keputusan oleh Petani, Perubahan Situasi dan Keputusan Agen, Hubungan Saling Percaya (*Trust*), Ikatan Hutang-Piutang, Hubungan Perlindungan dan Kesetiaan hingga kepada Hubungan Kolutif adalah fenomena sosiologis yang sangat nyata pada penelitian Bisnis kelapa Sawit ini, keadaan ini membuat sesuatu hal yang terstruktur dan berhierarki. Namun, disisi lain terkadang membentuk pola perilaku yang dinamis dalam menjalankan peranan keagenan dari sang pelaku bisnis dan kekuatan ekonomi pasar juga ikut mempengaruhi sistem jaringan bisnis kelapa Sawit di Asahan pada khususnya.
4. Jaringan bisnis kelapa sawit tersusun secara berjenjang, berhierarki, mulai dari para petani di desa, agen tempel, agen, dan agen besar, gudang, hingga yang paling tinggi adalah pabrik kelapa sawit. Seluruhnya terdapat lima jenjang pelaku yang dibentuk oleh tiga hal utama, yakni : suplay sumber daya, penerapan harga, dan kesalingtergantungan. Dalam jaringan ini, masyarakat petani menjadi bagian dalam perekonomian kapitalisme perkebunan.
5. Dalam dinamika perekonomian dan instabilitas harga, perilaku dan pengambilan keputusan oleh para pelaku bisnis berpola, yakni demi optimalisasi keuntungan dan mengatasi resiko dengan improvisasi dalam batas-batas yang masih bisa ditoleransi oleh pelaku yang lain.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam konteks jaringan bisnis kelapa sawit, sebagai berikut.

1. Untuk pemerintah daerah Asahan, dalam konteks ekspansi sawit terhadap pertanian tanaman pangan, harus dilakukan pembatasan alih fungsi lahan secara represif. Selain itu upaya pencegahan harus dilakukan dengan membuat kebijakan penetapan harga gabah. Hal ini penting untuk menghindari alih fungsi secara total dan berakibat pada lemahnya ketahanan pangan.
2. Untuk para pelaku bisnis kelapa sawit di level bawah, seperti agen dan petani, agar tetap menjaga keseimbangan arus kas (kas rumah tangga bagi petani) dan tidak berpikir bahwa jangkauan bisnis yang meluas seiring dengan pertambahan pendapatan. Ini menjadi penting dalam hal fluktuasi harga sawit. Sehingga para agen tidak terlalu bernafsu untuk memperluas jangkauan usahanya tapi justru merugi, atau petani yang bernafsu memperluas kebunnya tapi karena gejolak harga dan biaya operasional yang tinggi, justru merugi.
3. Untuk para pelaku bisnis, improvisasi untuk mempertahankan hubungan baik dan menjaga agar tetap bisa meraih keuntungan, sebaiknya dilakukan dalam batas-batas norma sosial yang berlaku. Sehingga tindakan-tindakan yang diambil untuk memperoleh keuntungan masih berada dalam kontrol norma sosial, dan tidak berakibat pada konflik.